

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019



TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah selesai dilaksanakan. Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2019 merupakan perwujudan dari bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah dalam satu tahun. Jadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan dijadikan bahan evaluasi untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah kedepannya. Sama halnya dengan penyusunan LPPD, penyusunan LKPJ juga harus disusun secara obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu harus memperhatikan relevansi, tepat waktu, dapat dipercaya, dan harus mudah untuk dipahami atau dimengerti. Tentu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pemerintah pada Dinas Kominfo ini masih terdapat banyak kealfaan, kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Demikian pula untuk semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan keuangan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan setulus tulusnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan khususnya buat para pengambil kebijakan.

Praya, Februari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Muhamad Zarkasi

NIP.196607061993031015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LKj-IP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LKj-IP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

LKj-IP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan peraturan inilah, maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan hanya pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Untuk mencapai kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informasi, dibuatlah sasaran strategis dengan tuuandan indikator kinerja. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang dicapai dapat terukur tingkat kemanfaatannya juga sesuai sarasannya. Adapun rincian capaian kinerja masing- masing indicator dapat diilustrasikan dalam table :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi yang memadai	Persentase OPD yang menggunakan E-Government dalam menyelenggarakan kegiatan utama	100%	Target kinerja Tahun 2019
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	63 OPD	Target kinerja Tahun 2019
	Meningkatnya pengembangan	Persentase data informasi dan	100%	Target kinerja Tahun 2019

	dan pemeliharaan data base	statistik daerah yang tersusun dengan baik		
	Meningkatnya pelayanan persandian daerah	Persentase layanan pengamanan informasi dan dokumen	100%	Target kinerja Tahun 2019

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi 100 % berdasarkan survey yang telah kami lakukan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 81 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 81 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi unsur organisasi maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Persandian dan Statistik, Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjalankan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2019 adalah sebanyak 28 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Menurut Komponen Jabatan

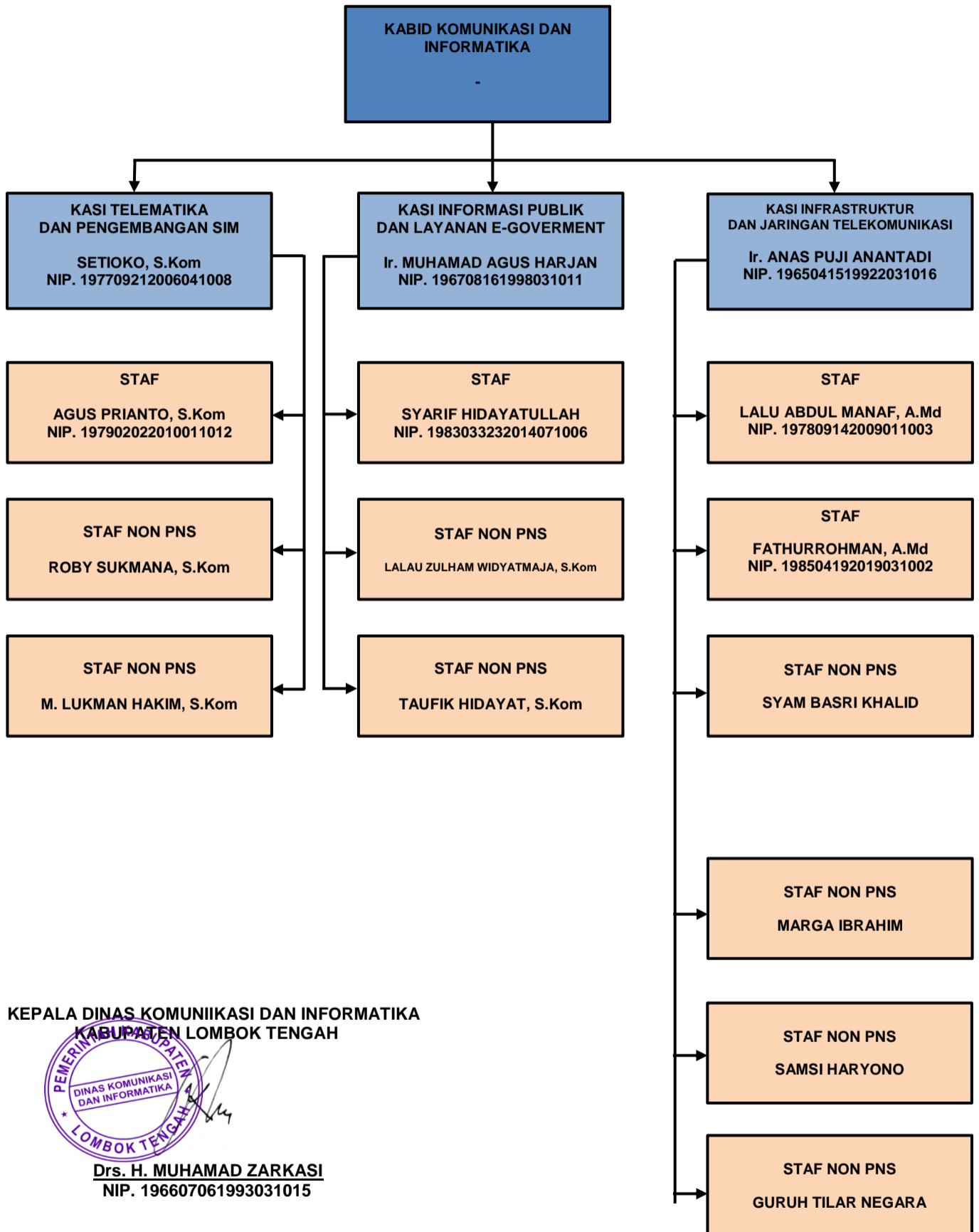
No	Jabatan	Kondisi		Ket +/-
		Eksisting	Kebutuhan	
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
5	Pelaksana pada Subbag Perencanaan dan Keu :			
	a. Bendahara	2	2	0
	b. Pengelola administrasi keuangan;	1	3	2
	c. Pengelola administrasi kepegawaian	1	3	2
	d. Bendahara Barang/Materil	1	1	1
	e. Penjaga Malam	0	1	1
	f. Tukang Kebun	1	1	0
6	Kabid Komunikasi dan Informasi	1	1	0
7	Kasi Kasi Infastruktur dan Jaringan	1	1	0
8	Kasi Informasi Publik & Layanan e – Gov	1	1	0
9	Kasi Telematika & Pengembangan SIM	1	1	0
10	Pelaksana Perekaman Verifikasi Data	1	1	0
	a. Pengelola Data Eletronik	0	2	2
	b. Pranata komputer.	0	2	2
	c. Pranata Komputer Jaringan Tenaga Statistik	2	0	2
11	Kabid Persandian dan Statistik	1	1	0
12	Kasi Perekaman dan Verifikasi Data	1	1	0
13	Kasi Statistik	1	1	0
14	Kasi Pengelola & Pengamanan Persandian	1	1	0
	a. Pengelola SIM;	0	3	3
	b. Tenaga statistik	0	2	2

1.3 Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Perbub Nomor 81 Tahun 2016



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

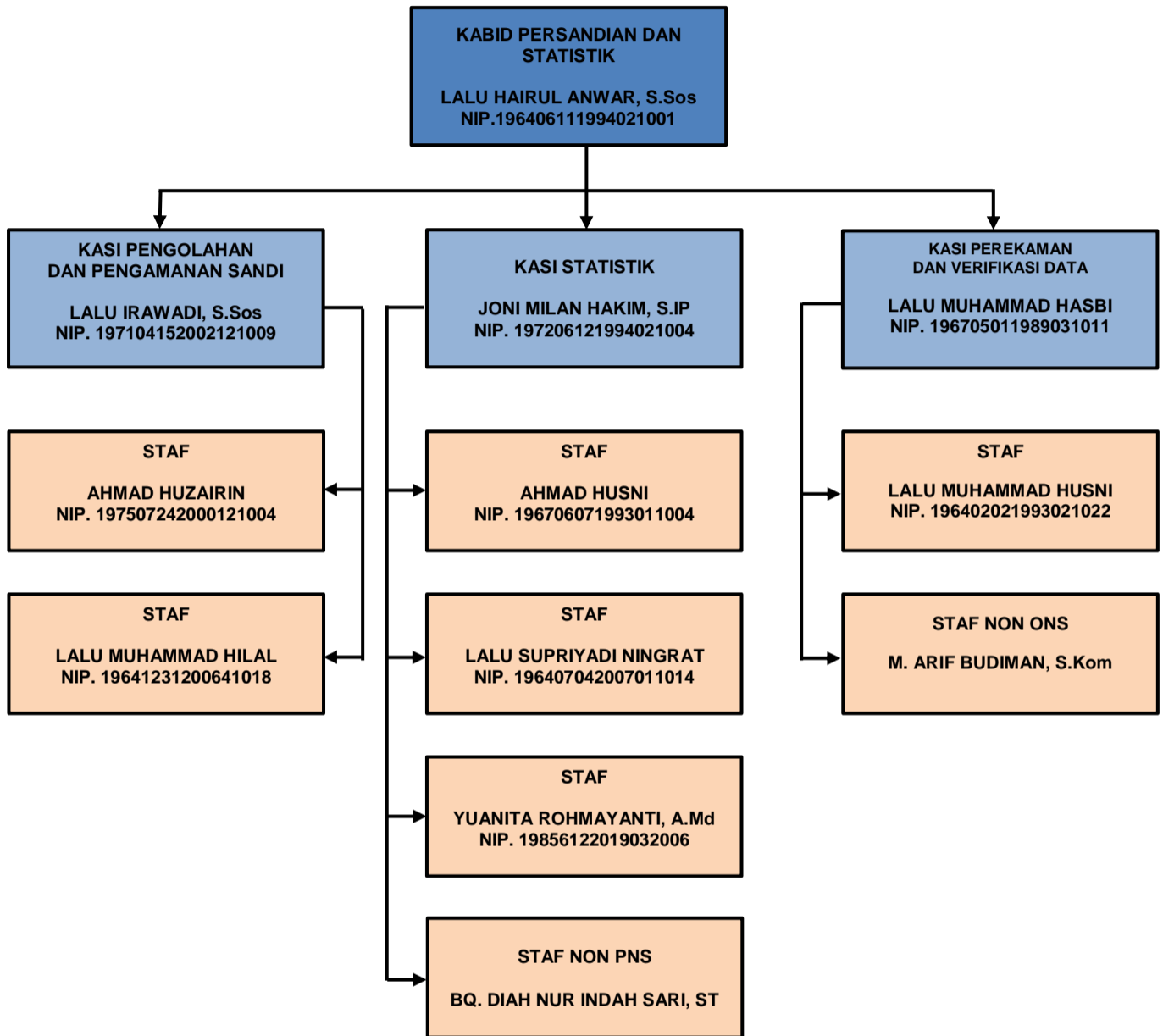


Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016

BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta sebagai dokumen perencanaan program yang dapat memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan Bupati untuk mendukung visi dan misi Bupati.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu **Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Bersatu** “ Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan pertimbangan Tugas dan Fungsi organisasi, maka Visi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ; **Terciptanya efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informasi dalam mewujudkan Lombok Tengah Bersatu;**

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: Terciptanya efektivitas dan efisiensi Komunikasi dan Informasi adalah terwujudnya pusat pelayanan Informasi bagi masyarakat Lombok Tengah dalam mengakses data yang diperlukan baik Informasi tentang kebijakan umum pemerintah maupun informasi-informasi lainnya di Kabupaten Lombok Tengah; Dengan pemahaman ini nantinya diharapkan akan terwujud masyarakat yang mengerti dan memahami Informasi dalam berbagai kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, Yaitu :

- Kata “beriman” berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- Kata “Sejahtera” berarti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan serta mendapatkan rasa aman;
- Kata “bermutu” berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi;
- Pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan;

- Mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi berbasis data.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2021 adalah:

- VISI : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.
- MISI Keempat : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan antar Kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar Wilayah;
Sasaran : Tersedianya system komunikasi dan Informasi yang memadai.
Terlaksananya penyebaran informasi terkait tata ruang;
- MISI Kelima : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
- Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Pemda dalam pelayanan Publik;
Sasaran 1 : Tertatanya administrasi perkantoran;
2 : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai;
3. : Tersedianya Dokumen Statistik Daerah;
4. : Tersedianya Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah.
5. : Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Dinas Komunikasi Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Komunikasi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sistem komunikasi dan informasi yang memadai	Persentase OPD yang menggunakan E- Government dalam penyelenggaraan kegiatan utama	100%
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	63 OPD
		Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	100%
		Meningkatnya pelayanan persandian daerah	Persentase layanan pengamanan informasi dan dokumen	100%

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah langkah strategi dan kebijakan OPD, adapun staregi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2. Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Tertatanya Administrasi Perkantoran;	Revitalisasi	Penataan pelayanan dan administrasi
2.	Tersedianya system Komunikasi dan informasi yang memadai;	Koordinasi, Fasilitasi	Kerjasama dengan Pemerintah dan dunia Usaha
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	Investasi dan Kontruksi	Pengadaan Sarana dan prasarana pemerintah
4.	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas	Revitalisasi, Inventarisasi, Koordinasi, Fasilitasi, Validasi	Pengelolaan data
5.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel	Koordinasi	Penilaian Kinerja

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.6 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 2.1 Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 3.2. Pemeliharaan Alat- alat Studio	
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4.1. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	
5	Program Pengembangan Data Informasi 5.1. Kegiatan Pengolahan, Updating, Analisa Data dan Statistik Daerah 5.2. Kegiatan Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun pertama Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2019 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021:

Berikut adalah rincian Penetapan Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2019

	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi yang memadai	1.Persentase OPD yang menggunakan E-Government dalam penyelenggaraan kegiatan utama 2.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100% 63 OPD
2	Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan data base	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	100%
3	Meningkatnya pelayanan persandian daerah	Persentase layanan pengamanan informasi dan dokumen	100%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 2.056.331.000** (Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Capain Kinerja	Keterangan
1	Nilai 86 % - 100 %	BAIK
2	Nilai 71 % - < 85 %	SEDANG
3	Nilai 56 % - < 70 %	KURANG
4	< 55%	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. SASARAN

Sasaran No.1 : Tersedianya sistem komunikasi dan informasi

Sasaran nomer 1 tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu :

- a) Persentase Perangkat Daerah (PD)
- b) Jumlah OPD yang terkoneksi dengan server Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Lombok Tengah
- c) Jumlah pengunjung website
- d) Persentase OPD yang menggunakan E-Government dalam penyelenggaraan kegiatan utama
- e) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel.
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi Tahun Sebelumnya		Target Akhir Renstra	Sumber Data	
						2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah SKPD yang dilayani koneksi Internet	SKPD	46	6	100	39	41		Laporan Tahunan	
2	Terpenuhinya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Diskominfo	PAKET	46	46	100	1	1		Web PemLoteng	
3	Jumlah pengunjung website	ORG	350.000	153,580	43,88		61,500			
4	Terpenuhinya sarana prasarana IT	PAKET	1	1	100	1	1			
5	Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.	ORG	36	10	27,77	3	4			
RATA-RATA						KRITERIA Tahun 2019 :				BAIK

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase jumlah SKPD yang dilayani koneksi internet realisasi sebesar 14,63% % dari target 100%. Realisasi ini dilihat dari 41 SKPD yang ditargetkan di realisasikan 6 SKPD . Hal ini mengalami penurunan dikarenakan ada beberapa SKPD jg kecamatan yang sdh mempunyai jaringan internet sendiri.

2. Meningkatnya jumlah SKPD yang terkoneksi dengan server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

3. Jumlah pengunjung website semakin meningkat dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana IT.

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase sarana dan prasarana IT reasliasi sebesar 100% dari target 100%. Sarana dan prasarana tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka mendukung berjalan lancarnya komunikasi data antar SKPD.

5. Tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK.

Berdasarkan evaluasi terhadap presentase tersedianya SDM yang menguasai bidang TIK realisasi sebesar 27,77% dari target 100%. SDM sangat berperan dalam rangka melakukan maintenance terhadap perangkat keras dan perangkat lunak terhadap semua prasaranan dan sarana yang ada sehingga prasarana dan sarana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kegunaan dan fungsinya.

Sasaran 2. Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah

Sasaran nomor 2 tersebut diukur dengan indiaktor kinerja persentase dan informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik

Tabel.

Evaluasi Capaian Kinerja sasaran Nomor 2 Tahun 2019.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	Paket	1	1	100%	1	Lap.tahunan dan IKU

Untuk tahun 2019 sesuai dengan IKU dan RKT indikator kerja dari sasaran 2 tersebut adalah Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik dengan target 100% dengan realisasi 100%. Ketersediaan data yang uptodate dan valid digunakan sebagai instrumen dalam pengambilan sebuah kebijakan dan kebutuhan lainnya oleh pengguna data.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan persandian daerah

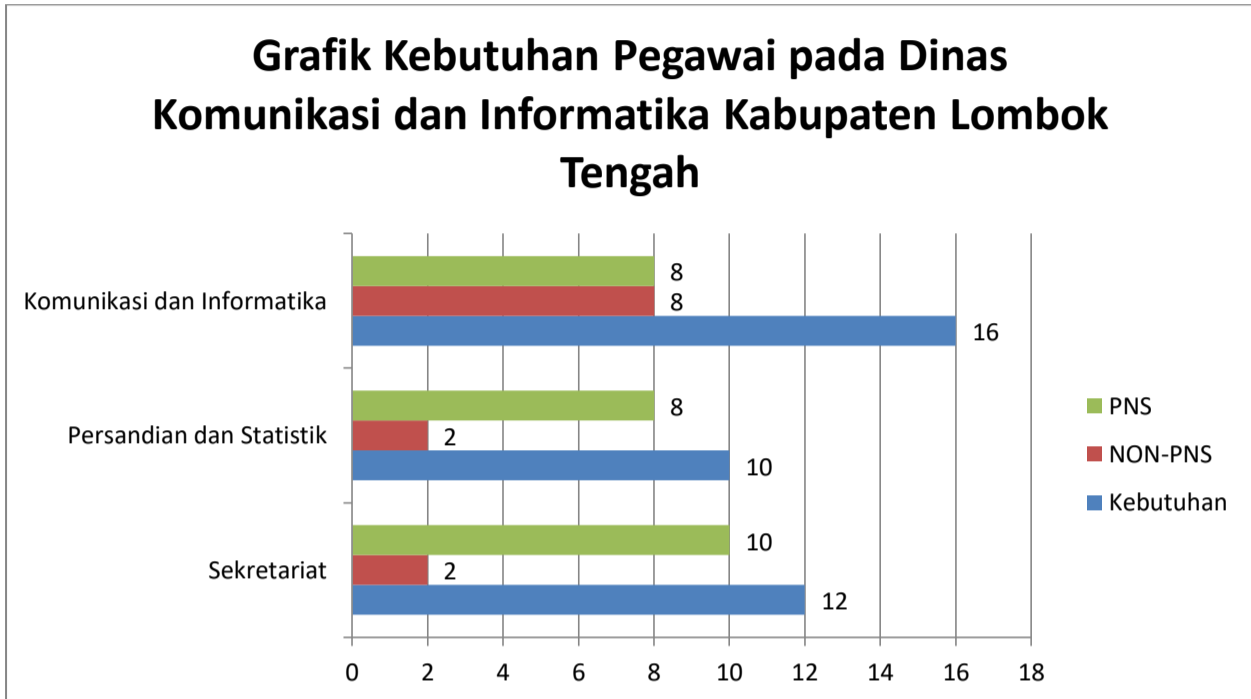
Meningkatnya pelayanan persandian daerah pada sasaran nomor 3 tersebut diukur dengan indiaktor kinerja persentase layanan pengamanan informasi dan dokumen pengamanan informasi dan dokumen.

Secara umum Pencapaian indikator sasaran tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa pencapaian tersebut disebabkan dalam penentuan target dilakukan secara terukur dan realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta adanya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang baik antar personil, adanya dukungan dana yang memadai serta adanya kegiatan penunjang lainnya. Untuk tahun 2019 target pencapaian seperti yang tercantum dalam IKU dan RKT masih sama dengan tahun 2018 karena tidak ada perubahan sasaran.

III. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informasi masih mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan teknis. Untuk itu dengan kondisi seperti ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab yang mereka miliki. Sehingga dapat dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini :



	Sekretariat	Persandian dan Statistik	Komunikasi dan Informatika
Kebutuhan	12	10	16
NON-PNS	2	2	8
PNS	10	8	8

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Komunikasi tahun 2019 dirinci sebagai berikut :

**Tabel III.
Aset Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tahun 2019**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	1.130.500.000,00	2
2.	KIB B	4.603.101.000,68	172
3.	KIB C	1108819000,25	9

4.	KIB D	5.000.000,00	1
5.	KIB E	-	-
6.	KIB F	-	-
	Jumlah		184

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Aset Tidak Digunakan Tahun 2019

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
	Jumlah	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Bidang Komunikasi dan Informasi telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi, pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Informasi terdapat Silva.

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan pagu anggaran Rp. 730.347.400, realisasi keuangan Rp. 711.773.601 persentase keuangan (97,46%) dan fisik (100%), sehingga sisa anggaran Rp. 18.573.799. Kegiatan ini bersisa dikarenakan sisa dari belanja E-Katalog yaitu belanja Broadband Internet dan sisa belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan yang pada saat itu akibat kekosongan jabatan di pertengahan tahun.

Kegiatan Pemeliharaan Alat- alat Studio dengan pagu anggaran Rp. 50.813.250, realisasi keuangan Rp. 39.171.000 dengan persentase keuangan (77,09%) dan fisik (100%), sehingga sisa anggaran Rp. 11.642.250. Hal ini terjadi sisa anggaran dikarenakan mengikuti harga dipasaran.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan pagu anggaran Rp. 566.460.000, realisasi keuangan Rp. 536.097.000 dengan persentase keuangan (94,64%) dan fisik (100%) sehingga sisa anggaran Rp. 30.363.000. Sisa Anggaran pada kegiatan tersebut dikarenakan E-katalog.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informasi dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.378.148.540,15	2.275.898.977,00	95,70
2.	Belanja Langsung	2.056.331.000,00	1.964.187.669,00	95,52
	Jumlah	4.434.479.540,15	4.240.086.646,00	95,62

Penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi 2019 sebesar 95,62% dari anggaran belanja tidak langsung 95,70% dan belanja langsung sebesar 95,52%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2019

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Tertatanya Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			99,44	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.385.878.600	Rp.364.590.413	94,48
2	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang valid dan berkualitas	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi daerah			100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 65.035.000	Rp. 59.123.000	90,91
3	Tersedianya system komunikasi dan informasi yang memadai	Meningkatnya fungsi dan jumlah sarana dan prasarana yang memadai			100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi	Rp.781.160.650	Rp.750.944.601	96,13
4	Tersedianya Sistem Informasi terhadap layanan publik	Meningkatnya efektifitas pengembangan informasi pembangunan publik			100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.566.460.000	Rp. 536.097.000	94,64
5	Terpenuhinya penyusunan dan pengembangan data statistik daerah	Terpenuhinya persandian dan telekomunikasi			100%	Program Pengembangan Data Informasi	Rp. 257796.750	Rp. 253.432.655	98,31

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2019 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah mengelola anggaran yang tertuang dalam Perubahan APBD 2019 sebesar Rp. 4.434.479.540,15 realisasinya mencapai Rp. 4.240.086.646,00 atau 95.62 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 194.392.894,00. Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan Laporan realisasi fisik dan keuangan untuk Tahun Anggaran 2019



**LAPORAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK TENGAH
KEADAAN s.d DESEMBER 2019**

NO	KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE (%)		SISA ANGGARAN
				KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,378,148,540.15	2,275,898,977	95.70	100.00	102,249,563
	BELANJA LANGSUNG	2,056,331,000	1,964,187,669	95.52	99.89	92,143,331
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	385,878,600	364,590,413	94.48	99.44	21,288,187
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,403,850	15,499,888	84.22	96.63	2,903,962
	Belanja Jasa Kantor					
	5.2.2.03.02 Belanja Air	4,000,000	2,067,394	52	100	1,932,606
	5.2.2.03.03 Belanja Listrik	14,403,850	13,432,494	93.26	93.26	971,356
						-
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124,172,000	123,119,500	99.15	100	1,052,500
	Belanja Barang dan Jasa					-
	5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik	1,554,000	1,529,000	98.39	100	25,000
	5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,610,000	1,602,000	99.50	100	8,000
	5.2.2.01.09 Belanja dekorasi dan publikasi	4,700,000	4,407,500	93.78	100	292,500
	5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	40,948,000	40,815,000	99.68	100	133,000
	5.2.2.20.05 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	75,360,000	74,766,000	99.21	100	594,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	107,013,250	90,765,020	84.82	100	16,248,230
	Belanja Barang dan Jasa					
	5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	74,303,250	68,687,950	92.44	100	5,615,300
	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service (penggantian suku cadang)	17,050,000	13,774,001	80.79	100	3,275,999
	5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	6,750,000	5,336,939	79.07	100	1,413,061

	5.2.2.05.07	Belanja STNK	8,910,000	2,966,130	33.29	100	5,943,870
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		45,830,000	45,583,000	99.46	100	247,000
	Belanja Pegawai						
	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,520,000	20,520,000	100.00	100	-
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.01.04	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	2,850,000	2,844,000	99.79	100	6,000
	5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3,060,000	2,920,000	95.42	100	140,000
	5.2.2.03.14	Belanja jasa tukang	14,400,000	14,400,000	100.00	100	-
	5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000	4,899,000	97.98	100	101,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		18,818,500	18,334,500	97.43	100	484,000
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.01.01	Belanja ATK	16,118,500	15,940,500	98.90	100	178,000
	5.2.2.01.04	Belanja prangko, dan benda pos lainnya	2,700,000	2,394,000	88.67	100	306,000
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		71,641,000	71,288,505	99.51	100	352,495
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,895,000	6,670,000	96.74	100	225,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64,746,000	64,618,505	99.80	100	127,495
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		65,035,000	59,123,000	90.91	100	5,912,000
7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		65,035,000	59,123,000	90.91	100	5,912,000
	Belanja Pegawai						
	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,260,000	27,510,000	82.71	100	5,750,000
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000	2,455,500	98.22	100	44,500
	5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	8,350,000	8,335,000	99.82	100	15,000
	5.2.2.11.02	Belanja makan minum	20,925,000	20,822,500	99.51	100	102,500
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		781,160,650	750,944,601	96.13	100	30,216,049
8	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		730,347,400	711,773,601	97.46	100	18,573,799
	Belanja Pegawai						
	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (PNS)	205,100,000	195,000,000	95.08	100	10,100,000
	5.2.02.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan (NON PNS)	81,400,000	81,400,000	100	100	-
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.01.06	Belanja BBM		2,580,000		100	

		2,580,000		100		-	
	5.2.2.03.06	Belanja kawat/faximile/internet	15,197,500	13,950,000	91.79	100	1,247,500
	5.2.2.03.14	Belanja jasa tukang	45,000,000	45,000,000	100.00	100	-
	5.2.2.03.17	honorarium narasumber/tenaga ahli	102,000,000	102,000,000	100.00	100	-
	5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000	3,000,000	100	100	-
	5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,000,000	995,500	99.55	100	4,500
	5.2.2.11.02	Belanja makan minum	17,800,000	15,635,000	87.84	100	2,165,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000	11,830,000	98.58	100	170,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62,389,900	62,190,001	99.68	100	199,899
	5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20,000,000	20,000,000	100.00	100	-
	Belanja Modal						
	5.2.3.28.02	Pengadaan alat rumah tangga (cctv,panel box,wireles)	53,820,000	52,600,000	97.73	100	1,220,000
	5.2.3.29.02	Pengadaan personal komputer (Komputer dekstop, Laptop dan computer pc)	94,560,000	92,400,000	97.72	100	2,160,000
	5.2.3.29.05	Pengadaan peralatan personal komputer (printer dan UPS, scan wajah)	14,500,000	13,193,100	90.99	100	1,306,900
9	Pemeliharaan Alat-alat Studio		50,813,250	39,171,000	77.09	100	11,642,250
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.03.06	Belanja kawat/faximile/internet	50,813,250	39,171,000	77.09	100	11,642,250
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		566,460,000	536,097,000	94.64	100	30,363,000
10	Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik		566,460,000	536,097,000	94.64	100	30,363,000
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.03.06	Belanja kawat/faximile/internet	566,460,000	536,097,000	94.64	100	30,363,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI		257,796,750	253,432,655	98.31	100	4,364,095
11	Kegiatan Pengolahan, Updating, Analisa Data dan Statistik Daerah		201,596,750	198,572,750	98.50	100	3,024,000
	Belanja Pegawai						
	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,350,000	19,150,000	94.10	100	1,200,000
	Belanja Barang dan Jasa						
	5.2.2.01.06	Belanja BBM	2,031,750	2,031,750	100.00	100	-
	5.2.2.03.17	honorarium narasumber/tenaga ahli	120,450,000	120,450,000	100.00	100	-

5.2.2.06.01	Belanja cetak	38,250,000	36,975,000	96.67	100	1,275,000
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000	4,901,000	98.02	100	99,000
5.2.2.11.02	Belanja makan minum	12,015,000	11,565,000	96.25	100	450,000
	Belanja Modal					-
5.2.3.29.05	Belanja modal peralatan personal komputer (printer)	3,500,000	3,500,000	100.00	100	-
						-
	Kegiatan Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi	56,200,000	54,859,905	97.62	100	1,340,095
	Belanja Pegawai					-
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,000,000	9,000,000	100.00	100	-
	Belanja Barang dan Jasa					-
5.2.2.11.02	Belanja makan minum	2,250,000	2,160,000	96.00	100	90,000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,200,000	950,000	79.17	100	250,000
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000	19,249,905	96.25	100	750,095
	Belanja Modal					-
5.2.3.29.02	Belanja modal pengadaan personal komputer (laptop)	15,000,000	15,000,000	100.00	100	-
5.2.3.29.05	Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (printer)	8,750,000	8,500,000	97.14	100	250,000
	TOTAL	4,434,479,540.15	4,240,086,646	95.62	99.89	194,392,894

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 di susun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 sasaran strategis.

Berdasarkan kelima sasaran strategis, maka realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 secara umum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun minimnya alokasi anggaran yang dikelola oleh Diskominfo, sehingga ide- ide atau rencana strategis yang masih belum optimal dapat dilaksanakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Praya, Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015

